KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Interpelasi Jokowi tak terbendung
Tanggal : Rabu, 26 November 2014
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 1 dan 19

Interpelasi Jokowi Tak Terbendung

Jakarta, Pelita

Penggunaan Hak Interpelasi oleh anggota DPR untuk mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM subsidi makin tak terbendung.

Hingga Selasa (25/11) sore, sebanyak 157 anggota DPR dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menggunakan hak interpelasi terkait pengalihan subsidi BBM. Hari ini, usulan itu diserahkan ke Pimpinan DPR RI agar dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk diagendakan pembacaan usulan dan pengesahannya di Sidang Paripurna DPR.

"Sore ini (Selasa, 25/11), tepat pukul 15.10 WIB kami menerima laporan sebanyak 157 anggota DPR menandatangani surat untuk menggunakan hak interpelasi. Mereka berasal dari Fraksi Golkar, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Gerindra," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun di Gedung Nusantara III DPR, Selasa (25/11).

Anggota DPR yang sepakat mengajukan hak interpelasi terdiri dari Fraksi Golkar 53 orang, Fraksi Keadilan Sejahtera 31 orang, Fraksi Gerindra 50 orang dan Fraksi Amanat Nasional 23 orang. Kemungkinan jumlah itu bertambah.

Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Demokrat belum menentukan sikap. Koalisi Merah Putih akan terus berkomunikasi dengan anggota Fraksi Demokrat. "Pengajuan hak interplasi ini melekat kepada DPR, tidak dilihat dari koalisi. Siapa saja bisa mengajukannya," kata Misbakhun didampingi Ecky Awal Muharam, anggota Komisi XI dari Fraksi Keadilan Sejahtera.

Nama-nama anggota DPR yang mengajukan hak interplasi itu akan diserahkan kepada pimpinan DPR, hari ini, pukul 14.00 WIB. Kemudian Badan Musyawarah DPR akan memutuskan jadwal rapat paripurna terkait pengajuan hak interpelasi.

"Ini bisa berlangsung cepat atau pun lambat, tergantung putusan Badan Musyawarah," katanya. Hak interplasi diajukan karena anggota DPR yang tergabung dalam KMP tidak ingin menggunakan hak bertanya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo menyatakan, komentar Jokowi yang mengatakan untuk pertama kalinya pemerintah diinterpelasi oleh DPR saat menaikkan harga BBM, Bambang menyatakan, untuk pertama kalinya juga pemerintah menaikkan harga BBM di saat harga BBM dunia menurus drasti.

"Pemerintah mana yang menaikkan harga BBM di saat harga BBM dunia turun drastis. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, kecuali di Indonesia," kata Bambang. Wakil Ketua Fraksi PPP DPR Syaifullah Tamliha mengatakan hak interpelasi terhadap kenaikan harga BBM subsidi kurang tepat. Terlebih, Pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan tersebut tanpa melalui persetujuan DPR.

> "Terlalu jauh mempersepsikan hak interpelasi untuk proses *impeachment* Presiden RI. Hak interpelasi itu dalam politik biasa-biasa saja. *Refly Harun*

"Kurang tepat (interpelasi, red). Pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR. Kebijakan itu tidak melanggar UU. Kalau tidak melanggar UU, kenapa harus interpelasi?," kata Tamliha.

Anggota Fraksi PKB DPR Mohammad Toha menyatakan, sebetulnya sangat cukup bila fraksi-fraksi KMP di DPR menanyakan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi melalui komisi-komisi terkait. Tak perlu hingga menggulirkan hak interpelasi.

"Masih banyak tugas, dan beban DPR lainnya yang harus segera dibahas. Kalau ingin menanyakan kebijakan kenaikan BBM, ya cukup di Komisi VII dan Komisi XI DPR," ucap Toha.

Adapun pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan terlalu jauh mempersepsikan hak interpelasi untuk proses *impeachment* Presiden RI. Hak interpelasi itu dalam politik biasa-biasa saja.

Hanya saja kenapa harus interpelasi jika yang dibutuhkan adalah jawaban dari Presiden RI

Bersambung Halaman 19

terkait kenaikan harga BBM. Namun demikian menurut Refly, interpelasi itu tergantung kepada perspektif, yaitu perspektif hukum, teknis dan politis.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM itu penting dan strategis karena menyangkut kepentingan rakyat, bangsa dan negara. "Jadi, interpelasi itu tidak ada masalah. Kalau teknis minimal 25 jumlah anggota DPR RI dan jumlah fraksi lebih dari satu, itu sudah terlampaui, dan kalau politis, bahwa menang – kalah itu menjadi penting.

Tapi, kalau gaduh bisa menganggu kinerja pemerintahan dan hanya akan melahirkan bintang-bintang dewan di Senayan," katanya. Sekali lagi kata Refly, kalau tujuannya hanya meminta keterangan dari Presiden RI, kenapa tidak menggunakan hak bertanya?

"Jadi, kalau tujuannya minta keterangan Presiden RI soal kenaikan harga BBM, tidak harus interpelasi, melainkan terlebih dahulu hak menyatakan pendapat, angket dan kalau tidak puas dengan penjelasan pemerintah, maka baru interpelasi dan kita terus mendukung agar DPR bersatu," katanya. **(cr-14/kh)**